

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi Indonesia secara geografis berada di garis khatulistiwa membuat potensi bencana alam terbilang besar, tidak heran jika Indonesia adalah negara yang sering dilanda banjir, hingga kini banjir masih terus terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam merespon masalah tersebut, segala daya dan upaya dalam menyelesaikan masalah banjir sudah dilakukan namun nahas banjir masih kerap terjadi bahkan merugikan rakyat. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga sudah maksimal tetapi masih belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Banjir adalah bencana yang sangat merugikan, banjir merugikan secara materil dan imateril. Kerugian materil akibat banjir adalah infrastruktur yang rusak, fasilitas publik rusak, perumahan yang rusak dan sebagainya. Sedangkan, kerugian imateril akibat banjir adalah akses jalan masyarakat tertutup sehingga tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, ketakutan traumatis akut, bahkan merenggut korban jiwa. Oleh karenanya, pemerintah sepatutnya memberi perhatian terhadap bencana banjir di Indonesia. Pengendalian air yang baik dapat membuat Indonesia bebas banjir karena banjir bukan merupakan fenomena alam tetapi suatu yang dapat diprediksi serta disebabkan oleh campur tangan manusia.

Pembangunan gedung tanpa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kerap terjadi, pembangunan rumah di atas tanah negara dengan mengambil sebagian luas saluran untuk kepentingan pribadi, dan kondisi saluran sungai yang kotor dipenuhi lumpur menyebabkan banjir selalu terjadi berulang-ulang pada suatu wilayah. Jika hal tersebut terus dilakukan maka dampak negatif jangka panjang akan menakutkan karena apabila pemerintah tidak berbuat sesuatu yang terjadi ialah wilayah-wilayah akan tenggelam seperti yang dikabarkan oleh media-media, kini diperlukan kebersatuan antara rakyat dan pemerintah untuk serius memperhatikan bencana banjir.

Dilansir dalam buku Banjir Ibukota 2002 karya A.R Soehoed setidaknya ada tiga lingkup permasalahan banjir yang dikategorikan sasarannya antara lain :

- a. Memilih cara yang terbaik dan yang paling efektif untuk mengendalikan arus banjir,
- b. Berbagi arus banjir untuk melintasi tanah datar alluvial wilayah metropolitan atau wilayah jabodetabek, dan
- c. Mengamankan muara-muara sungai agar banjir dapat tercurah dengan lancar ke laut.

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat 34 wilayah yang mengalami banjir data dari tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa bencana banjir cukup serius perlu diatasi karena akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat.

Tabel 1.1
Data Jumlah Banjir di Indonesia

Provinsi	Banjir		
	2014	2018	2021
ACEH	1649	2209	1435
SUMATERA UTARA	807	942	732
SUMATERA BARAT	306	440	342
RIAU	512	584	455
JAMBI	518	575	476
SUMATERA SELATAN	745	584	380
BENGGKULU	213	231	171
LAMPUNG	508	584	328
KEP. BANGKA BELITUNG	58	186	59
KEP. RIAU	51	76	61
DKI JAKARTA	151	101	109
JAWA BARAT	1193	1185	1193
JAWA TENGAH	1273	1452	1249
DI YOGYAKARTA	76	215	50
JAWA TIMUR	1218	1422	1176
BANTEN	531	501	419
BALI	58	95	39
NUSA TENGGARA BARAT	286	363	187
NUSA TENGGARA TIMUR	445	532	570

KALIMANTAN BARAT	616	957	864
KALIMANTAN TENGAH	534	793	735
KALIMANTAN SELATAN	623	619	929
KALIMANTAN TIMUR	409	411	343
KALIMANTAN UTARA	140	253	200
SULAWESI UTARA	353	480	288
SULAWESI TENGAH	731	711	567
SULAWESI SELATAN	728	734	620
SULAWESI TENGGARA	702	623	240
GORONTALO	323	329	259
SULAWESI BARAT	159	193	125
MALUKU	233	221	153
MALUKU UTARA	285	364	270
PAPUA BARAT	88	169	138
PAPUA	308	541	204

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Jika dilihat dari tabel 1.1 angka jumlah banjir yang terjadi relatif menurun artinya program yang diterapkan juga memberikan hasil yang baik. Meskipun menurun pemerintah jangan cepat puas atas hasil yang didapat, karena dilansir dalam data.pu.go.id pada Desember 2019 bahwa terdapat 5 provinsi yang berlangganan banjir yakni :

1. Jawa Timur
2. Jawa Tengah
3. Jawa Barat
4. Aceh
5. Sumatera Selatan

Berlandaskan data diatas menarik untuk dilihat ialah jawa barat yang dimana di dalamnya terdapat ibukota negara yaitu provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu wilayah yang paling sering mengalami banjir pada tahun 2014 kejadian banjir dialami sebanyak 151 kali, 2018 sebanyak 101 kali, dan 2021 sebanyak 109 kali hasil yang positif adanya penurunan jumlah banjir dari tahun ke tahun. Menurut Isnugroho (2006), kawasan rawan banjir genangan merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir

genangan sesuai karakteristik penyebab banjir. oleh sebab itu secara geografis Jakarta merupakan dataran rendah yang berada di antara hulu, sungai, dan pesisir. Penyebab-penyebab banjir di Jakarta bukan hanya semata-mata karena hujan yang turun melainkan ada 3 faktor penyebab yaitu: (sumber : pantaubanjir.jakarta.go.id, 2020).

1. Banjir Hujan Lokal

Hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi dalam durasi yang lama di wilayah Jakarta akan mengisi saluran-saluran air dan daerah cekung. Jika tidak tertampung lagi, air akan meluap hingga menyebabkan banjir. Selain itu, dimensi drainase kota Jakarta dirancang untuk menampung debit air dengan curah hujan maksimal 120 mm/hari. Namun, pada beberapa hujan besar ekstrem yang terjadi di Jakarta, curah hujan melebihi kapasitas tersebut. Contohnya pada 1 Januari 2020 lalu, curah hujan Jakarta mencapai 377 mm/hari dan merupakan yang tertinggi selama 24 tahun. Sehingga banjir pun melanda sebagian besar wilayah Ibu Kota.

2. Banjir Kiriman

Karena berada di wilayah dataran rendah dan memiliki 13 aliran sungai, Jakarta dapat banjir jika hujan terjadi di hulu sungai. Hujan dengan intensitas tinggi di daerah hulu (Jawa Barat dan Banten) akan terbawa melalui aliran sungai ke Jakarta sebelum lepas ke laut. Hal inilah yang membuat sungai yang bermuara di Jakarta meluap dan mengakibatkan banjir. Pada saat kondisi tertentu kapasitas aliran sungai di Jakarta tersebut tidak cukup menampung air, sehingga terjadi limpasan di beberapa bantaran sungai di Jakarta.

3. Banjir Rob

Selain karena hujan dan kiriman debit air dari hulu, Jakarta juga rentan terkena pasang air laut (Rob). Hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta. Kini, di samping karena pasang air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga mempengaruhi meningkatnya banjir rob.

DKI Jakarta ibukota negara yang tergolong kota maju masih menjadi kota banjir bagi penduduknya, sungguh disayangkan yang seharusnya menjadi kota

percontohan untuk wilayah lain justru ternyata juga dilanda banjir. dilansir dalam buku Bencana Banjir ROB 2013 ada dua tipe kerusakan akibat banjir yakni :

- a. Tangible (yang dapat dihitung) seperti kerusakan property, mobil, alat rumah tangga dan sebagainya,
- b. Intangible (yang tidak dapat dihitung) seperti stress, depresi, ketidaknyamanan, sakit dan sebagainya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda DKI Jakarta) merancang banyak terobosan demi membebaskan Jakarta dari banjir diantaranya ialah Pasukan Biru untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta yang tersebar di setiap kecamatan. Lalu, dilansir dalam bpbd.jakarta.go.id pada Sabtu, 23 Oktober 2021 bahwasannya Pemda DKI Jakarta melakukan berbagai program seperti Gerebek Lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.

Pemda DKI Jakarta juga menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang turut menjadi kawasan serapan air hujan. Tidak lupa juga Pemda DKI Jakarta membuat Taman Grande yang bertujuan merevitalisasi taman-taman yang sudah ada sehingga naik level. Kemudian hadirnya sumur resapan atau drainase vertikal adalah bentuk antisipasi oleh Pemda DKI Jakarta untuk menampung air bersih atau menyerap air banjir, lalu melakukan naturalisasi kali dan sungai agar lingkungan aman bagi masyarakat sekitar. Upaya juga dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap banjir ROB akibat naiknya permukaan laut, dengan berkolaborasi Bersama kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun tanggul pantai sepanjang wilayah pesisir Jakarta.

Tabel 1.2
Laporan Customer Relationship Management Banjir

No	Trace No.	Tanggal Masuk	Wilayah	Kecamatan	Validasi	Ketinggian Air
1.	JK2102200799	20/02/2021	Jakarta Timur	Duren Sawit	Valid	240cm
2.	JK2102200657	20/02/2021	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Valid	200cm
3.	JK2102200647	20/02/2021	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Valid	200cm
4.	JK2102200794	20/02/2021	Jakarta Timur	Makasar	Valid	160cm
5.	JK2102200227	20/02/2021	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Valid	150cm
6.	JK2102190245	19/02/2021	Jakarta Timur	Makasar	Valid	150cm
7.	JK2102200565	20/02/2021	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Valid	150cm
8.	JK2102190257	19/02/2021	Jakarta Timur	Makasar	Valid	150cm

Sumber : pantaubanjir.jakarta.go.id 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, warga melaporkan banjir di kecamatan Kebayoran Baru dengan tinggi air mencapai 200cm terjadi pada tanggal 20 Februari 2021. Banjir merupakan suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Di wilayah-wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat ini, permasalahan banjir belum dapat terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya (Suripin, 2004). Dari data diatas hal ini menggambarkan bahwa banjir masih terjadi terutama Kecamatan Kebayoran Baru, faktor yang menyebabkan banjir ialah pemukiman yang padat dan kumuh, kurang tersedianya saluran atau drainase, kondisi saluran drainase yang kotor dan berlumpur yang disebabkan karena ulah manusia. Kecamatan kebayoran baru berada di urutan 3 besar di laporan customer

relationship management banjir yang artinya termasuk yang tertinggi diantara wilayah yang lain. Merujuk data Customer Relationship Management (CRM) tersebut maka keboyoran baru memang memiliki beberapa titik-titik rawan banjir yang akan dijabarkan oleh Tabel 1.3 di bawah.

Tabel 1.3

Titik Genangan Kecamatan Kebayoran Baru 2021

No.	Kelurahan	Penyebab	Tahun
1.	Gunung Jl. Hang Lekiu	PHB Jelawe Meluap Karna pertemuan antara kali Grogol dan PHB Jelawe Ketinggian Genangan 40 Cm	2021
2.	Kramat Pela Jl. Lamandau	Daerah Cekungan Ketinggian Genangan 30 Cm	2021
3.	Gandaria Utara Jl. BRI Radio Dalam (Pasar Inpres)	PHB Jelawe Meluap Karna <u>penyempitan dan adanya bangunan di atas PHB</u> Ketinggian Genangan:30 Cm	2021
4.	Gunung Jl. Bujana Dalam (Kantor Lurah)	Kali Grogol Tidak menampung debit air. Ketinggian genangan : 50 Cm	2021
5.	Gandaria Utara Jl. Haji Salim	Kali Grogol Tidak menampung debit air.Ketinggian genangan : 40 Cm	2021
6.	Pulo Jl. Dharmawangsa Raya (Taman Gajah)	Antrian air di waduk Oasis. Ketinggian genangan : 40 Cm	2021
7.	Cipete Utara Jl. Rs. Fatmawati (ITC Fatmawati)	Penyempitan Crossing menuju PHB Sawo Ketinggian genangan : 40 Cm	2021
8.	Gandaria Utara Jl. Hj. Nawi (Richeese Factory)	Penyempitan Crossing menuju PHB Sawo Ketinggian genangan : 40 Cm	2021
9.	Melawai Jl. Sultan Hasanudin	Penyempitan Crossing menuju PHB Sawo	2021

	(Sekitar Underpass/Lapangan Bhayangkara)	Ketinggian genangan : 40 Cm	
10.	Melawai Jl. Aditya Warman (Depan Resto Kenjiro)	Penyempitan Crossing menuju PHB Sawo Ketinggian genangan : 40 Cm	2021
11.	Selong Jl. Sanjaya Buntu (Komplek Menkeu)	Saluran Tidak Koneksi ke PHB Ketinggian genangan : 30 Cm	2021
12.	Senayan Jl. Widyachandra (Komplek Lipi)	Kali Krukut tidak menampung debit air Ketinggian genangan : 100 Cm	2021
13.	Petogogan Jl. Wijaya Timur Gg. Langgar (Kampung Sawah Belakang Kantor Lurah)	Kali Krukut tidak menampung debit air Ketinggian genangan : 100 Cm	2021
14.	Cipete Utara Jl. Pangeran Antasari Gg. Koba	Kali Krukut tidak menampung debit air Ketinggian genangan :100 Cm	2021

Sumber ; DOC-20220802-WA0167 Sumber Daya Air Kec Kby Baru, 2022

Titik genangan Kecamatan Kebayoran Baru bervariasi banyak disebabkan karena tidak menampungnya debit air di saluran atau kali, saluran tidak terhubung ke saluran penghubung (PHB), penyempitan crossing, atau luapan air karena adanya penyempitan dan bangunan diatas PHB. Banjir yang dialami mempunyai ketinggian berkisar 30cm-100cm ini menunjukkan jika banjir terjadi akan beresiko menghambat akses jalan, transportasi umum, dan merusak fasilitas publik. Kelurahan yang sering mengalami banjir ialah Gandaria Utara, Cipete Utara, dan Petogogan. Terutama pada kelurahan Cipete Utara pada kawasan Jl. RS Fatmawati patokan ITC Fatmawati sering viral di media sosial karena merupakan jalan besar dan dilalui 4 arah persimpangan kendaraan sehingga ketika mengalami banjir bahkan ketika air luapan hingga masuk ke dalam restoran Richeese Factory

maka warga banyak yang mengeskpos melalui media sosial seperti *Instagram* atau *Broadcast Message Whatsapp* hal ini yang membuat ramai seakan-akan banjir terjadi karena Pemda DKI Jakarta abai dalam melakukan pemeliharaan, penanganan, dan penanggulangan bencana banjir. Padahal kegiatan itu telah dilaksanakan oleh personel Pasukan Biru namun dikarenakan penyebabnya penyempitan saluran, pembangunan diatas PHB, Kabel Utilitas, dan tidak menampungnya debit air maka banjir kian terjadi.

Tabel 1.4

Lokasi Genangan Yang Disebabkan Kabel Utilitas

1.	Melawai Jl. Panglima Polim Raya (NOBL) Kel. Melawai	Disebabkan Kabel Utilitas	2021
2.	Melawai Jl. Adityawarman (Restoo Daun Muda)	Disebabkan Kabel Utilitas	2021
3.	Gandaria Utara Jl. RS Fatmawati (Hotel 88)	Disebabkan Kabel Utilitas	2021

Sumber : DOC-20220802-WA0167 Sumber Daya Air Kec Kby Baru, 2022

Titik banjir juga disebabkan oleh kabel utilitas ini yang menjadi faktor penghambat penyelesaian banjir di Kecamatan Kebayoran Baru dikarenakan personel Pasukan Biru harus berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penanggungjawab kabel utilitas, pada Tabel 1.4 terdapat 3 lokasi yaitu Melawai di Jl. Panglima Polim, Melawai di Jl. Adityawarman, dan Gandaria Utara di Jl. RS Fatmawati oleh karenanya dibutuhkan sinergitas antara Pasukan Biru dan PLN dalam menanggulangi bencana banjir.

Pada penelitian, Agisni Aulia Silfa Putri, Khaerul Umam Noer, Mawar, Dini Gandini Purbaningrum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Dalam Penanggulangan Pra Bencana Banjir Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD belum bisa dikatakan efektif karena dalam realisasi dan pelaksanaanya belum merata di seluruh wilayah

Kabupaten Bekasi. Dari sisi komunikasi, sudah ada komunikasi dan koordinasi BPBD Kabupaten Bekasi dengan organisasi/pihak terkait penanggulangan pra bencana. Namun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan secara optimal di tingkat desa. Jika penelitian tersebut dikaitkan dengan Efektivitas Penanganan Banjir oleh Pasukan Biru Di Kecamatan Kebayoran Baru maka terdapat relevansi pada hasil penelitian yaitu terkait pencapaian tujuan yang dimana personel Pasukan Biru memiliki tujuan penyelesaian genangan akibat banjir, lalu integrasi artinya sistem yang telah dirancang oleh Pemda DKI Jakarta dapat diimplementasikan dalam proses penyelesaian pengaduan banjir, dan laporan banjir hal tersebut diperlukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru, kemudian terkait adaptasi personel Pasukan Biru terhadap bencana banjir sesuai dengan kondisi di tempat.

Batas wilayah Kecamatan Kebayoran Baru dari arah utara yaitu Jl. Hang Lekir & Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tanah Abang serta Jl. Gatot Subroto Kec. Setiabudi. Dari arah timur yaitu Kali Krukut Kec. Mampang Prapatan. Dari arah Selatan yaitu Jl. Margaguna, Jl. Hj. Nawi & Jl. Abdul Majid Raya Kec. Cilandak. Dari arah barat yaitu Kali Grogol Kec. Kebayoran Baru.

Adapun jumlah Kantor Administratif Kelurahan, meliputi sebagai berikut :

1. Kelurahan selong
2. Kelurahan gunung
3. Kelurahan kramat pela
4. Kelurahan gandaria utara
5. Kelurahan cipete utara
6. Kelurahan pulo
7. Kelurahan melawai
8. Kelurahan petogogan
9. Kelurahan rawa barat
10. Kelurahan senayan

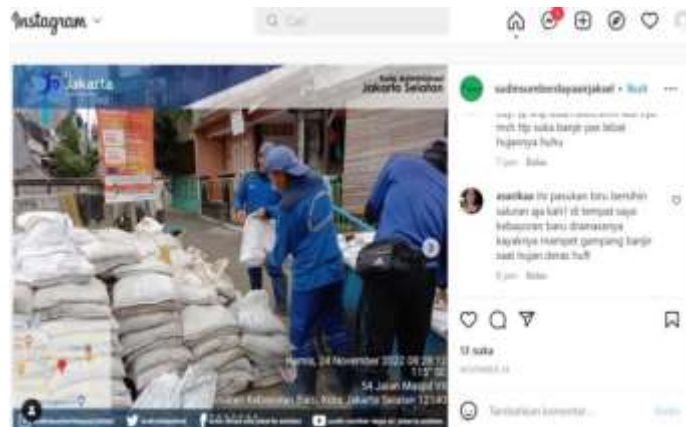
1.1.1 Pasukan Biru

Dalam rangka menyelesaikan masalah banjir hingga tuntas, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan unit kerja melalui Sumber Daya

Air (Sudin SDA) yaitu dibentuknya Pasukan Biru. berlandaskan hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 249 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, agar dapat melayani masyarakat terutama dalam penanganan banjir. Sebelum pasukan biru terbentuk, sebenarnya sudah ada bernama Petugas Kebersihan Luar Gedung (PKLG) dengan seragam oranye, namun karena kesulitan membedakan yang sedang bekerja di lapangan dengan petugas dari berbagai macam Satuan Tugas Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta maka diremajakan menjadi Pasukan Biru dengan tujuan agar mudah membedakannya. Penanganan banjir oleh Pasukan Biru dimulai dari tahun 2016 hingga kini tahun 2023 masih terdapat banjir di beberapa kawasan terutama wilayah Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Baru.

Gambar 1.1

Responsivitas Warga Kecamatan Kebayoran Baru Terhadap Pasukan Biru



Sumber : Media Sosial Instagram Pasukan Biru (@sudinsumberairjksel)

Pasukan biru diharapkan mampu menangani banjir, menyelesaikan laporan dari masyarakat, dan mengelola saluran drainase sebaik mungkin agar meminimalisir banjir. tetapi yang terjadi saat ini ialah selalu mengalami banjir, berulang kali banjir terjadi setiap hujan turun. Ditambah respon masyarakat kecamatan Kebayoran Baru jika dilihat dari media sosial kurang sadar adanya pasukan biru untuk melapor banjir. pada gambar 1.1 terlihat bahwa minimnya sosialisasi terhadap warga kecamatan Kebayoran Baru mengakibatkan warga

merasa hasil kinerja Pasukan Biru tidak terasa nyata. Hal ini merupakan dampak dari sosialisasi yang minim kepada warga Kecamatan Kebayoran Baru.

Pada penelitian, Ach. Apriyanto Romadhan, Ahmad Rusydan Fakhri, Iradhad Taqwa Sihidi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, jurnal keenam, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik” Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah terealisasi baik dilihat dari komunikasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melalui tahap awal komunikasi terlaksananya sosialisasi pola pengendalian banjir, pelaksanaan pembangunan tanggul, peggantian ganti rugi hingga evaluasi tiap bulanya untuk memonitor pelaksanaan kebijakan, serta sumberdaya yang sesuai kompeten dalam menjalankan tugas, struktur birokrasi yang mendukung dan adanya pembagian kewenangan yang jelas tidak tumpang tindih yang dilakukan oleh BBWS bengawan solo sehingga implementasi kebijakan terlaksana dengan baik dan terbebas dari bencana banjir tahunan sejak tahun 2013.

Tugas daripada personel Pasukan Biru yakni berperan Pasukan Biru dalam mengatasi banjir di Jakarta teramat penting melihat pengelolaan, pengembangan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan adalah tugas pokok dan fungsi Pasukan Biru, maka diperlukan keefektivitasan dalam menjalani tugasnya. Hal ini agar efektif dan hasil yang dicapai sesuai rencana awal dibentuknya Pasukan Biru dalam mengatasi banjir di Jakarta khususnya Kecamatan Kebayoran Baru. Personel Pasukan Biru yang setiap harinya perlu melakukan pengerukan sebanyak 2kubik lumpur setiap anggota maka perlu diperiksa langsung agar realisasi sesuai rencana, lalu, terkait pengelolaan dan pengembangan sistem drainase apakah sudah dilakukan dengan baik artinya peran personel Pasukan Biru dalam mengelola dan mengembangkan bukan hanya sekedar pengangkatan lumpur tetapi perbaikan drainase dan pengembangan meskipun kondisi lokasi ada yang bermasalah contoh adanya pembangunan diatas saluran oleh warga, maka personel pasukan biru seharusnya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.

Sayangnya, meskipun Pasukan Biru sudah melaksanakan tugas seperti mengelola dan mengembangkan system drainase, melayani masyarakat yang terdampak genangan banjir, melaksanakan kordinasi dan evaluasi, banjir tetap kian terjadi, dan warga masih ada yang belum memahami adanya Pasukan Biru. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah efektif Pasukan Biru di Kecamatan Kebayoran Baru. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan penulis, efektivitas Pasukan Biru belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu penulis ingin mengupas tuntas yang dialami oleh masyarakat dengan cara melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada judul “**Efektivitas Penanganan Banjir Oleh Pasukan Biru Di Kecamatan Kebayoran Baru**” dengan teori pengukuran efektifitas menurut Sutrisno (2007:125).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Banjir di Kecamatan Kebayoran Baru
2. Proses pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan sistem drainase
3. Kurangnya sosialisasi Pasukan Biru kepada warga Kecamatan Kebayoran Baru.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada efektifitas penanganan banjir oleh pasukan biru di kecamatan kebayoran baru yang masih harus ditingkatkan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penanganan banjir oleh pasukan biru di kecamatan Kebayoran Baru?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasukan Biru di Kecamatan Kebayoran Baru.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia akademis khususnya prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama yang berkaitan dengan teori efektifitas menurut Sutrisno (2007:125) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, perubahan nyata.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efektifitas penanganan banjir oleh pasukan biru dalam penanggulangan banjir di kecamatan kebayoran baru.
2. Penelitian ini dapat dijadikan kajian referensi dan juga masukan untuk Dinas Sumber Daya Alam dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektifitas kinerja pasukan biru dalam penanganan banjir agar sesuai dengan tujuan program pemerintah provinsi DKI dan dinas SDA Jakarta untuk meminimalisir dampak banjir sesuai harapan masyarakat.